



Home / Archives / Vol 7 No 1 (2026): Edisi Januari 2026 - Juni 2026

DOI: <https://doi.org/10.36490/jes.v7i1>

Published: 2026-01-01

Articles

Pengaruh Kredit Perbankan Sektor Pertanian Dan Belanja Pemerintah Terhadap Produksi Sektor Pertanian Di Jawa Timur Tahun 2016-2022

Sarirotul 'Alim, Agus Eko Sujianto, Kutbuddin Aibak

1-14



Modal Sosial Islami: Karakteristik Sistem Pengendalian Manajemen Menuju Kinerja Inovatif (Studi Pada BPRS X Jawa Tengah)

Ananda Setiawan

15-26



Analisis Korelasi Indikator Sosial Ekonomi Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024

Fajrin Achmad Rizki

27-39



Pemahaman Literasi Keuangan Dan Pemanfaatan Teknologi Digital Dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan UMKM Studi Kasus Pada Berkah Dimsum Medan

Juliana Purnama Sari Hutagaol, Vidya Fathimah

40-56



Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Makanan Dan Minuman Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2024

Nurul Afifah, Zulkifli Zulkifli

57-75



Pengaruh Pemanfaatan Digitalisasi Akuntansi Dan Penerapan Point Of Sales (Pos) Terhadap Profitabilitas UMKM Dengan Literasi Keuangan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus UMKM Di Kota Yogyakarta)

Agung Slamet Prasetyo, Nur Adira Priyawina

76-94



Upskilling Sumber Daya Manusia: Kajian Literatur

Sarah Imelda

95-111



Contact Us

Editorial Team

Reviewers

Peer Review process

Publication Ethics

Author Guidelines

Open Access Statement

Manuscript Template

Plagiarsm Check

Online Submission

Facus and Scope

Article Processing Charge

Licence Term



Language

English

Bahasa Indonesia

Information

For Readers

For Authors

For Librarians

Open Journal Systems

Editorial Office :

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS TJUT NYAK DHIEN (UTND)

Jalan Gatot Subroto,/ Jl. Resmi no 28 Sei Sikambing C. II, Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara 20123

E-mail : journal.jes@gmail.com / website : <https://journal.utnd.ac.id/index.php/jes>



PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP *TAX AVOIDANCE* PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR MAKANAN DAN MINUMAN DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2020-2024

¹Nurul Afifah, ²Zulkifli

Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha

Email: afia11567@gmail.com

Abstract

This study aims to examine the impact of Good Corporate Governance on tax avoidance in manufacturing companies in the food and beverage sub-sector during the 2020–2024 period. This research is quantitative in nature and uses secondary data in the form of annual reports published by the Indonesia Stock Exchange (IDX) on the website www.idx.co.id. In this study, the population consists of 40 manufacturing companies in the food and beverage sub-sector for the 2020–2024 period. The sampling method used is purposive sampling, resulting in a total sample of 12 companies. Data analysis is conducted using multiple linear regression. The results show that institutional ownership affects tax avoidance, independent commissioners affect tax avoidance, and managerial ownership has no effect on tax avoidance. Simultaneously, Good Corporate Governance variables have a significant effect on tax avoidance

Keywords: *Good Corporate Governance, Institutional Ownership, Independent Board of Commissioners, Managerial Ownership, Tax avoidance.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak *Good Corporate Governance* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sub-sektor makanan dan minuman tahun 2020-2024. Penelitian ini ialah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder berupa *annual report* yang dipublikasi Bursa Efek Indonesia pada website www.idx.co.id. Dalam penelitian ini, populasi terdiri dari 40 perusahaan manufaktur sub-sektor makanan dan minuman tahun 2020-2024. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* dengan total sampel sebanyak 12 perusahaan. Analisis data menggunakan regresi linier berganda. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*, dewan komisaris independen memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*, dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, serta secara simultan terdapat pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Kata Kunci: *Good Corporate Governance, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Manajerial, Tax Avoidance.*

PENDAHULUAN

Pajak ialah salah satu kontributor pendapatan negara terbesar yang bersifat memaksa dan secara tidak langsung mempengaruhi perusahaan. Beban pajak menjadi salah satu faktor yang mendorong manajemen dalam menerapkan perencanaan keuangan guna menjaga efisiensi operasional dan keberlanjutan perusahaan. Perencanaan keuangan tersebut adalah *tax avoidance* yang dilakukan sebagai respons atas sifat pajak yang wajib dan tidak memberikan imbalan, sebagaimana tercantum dalam ketentuan UU Nomor 7 Tahun 2021, menyatakan bahwa “pajak merupakan sumbangan yang harus diberikan kepada negara, baik oleh individu maupun entitas, tanpa ada imbalan yang diterima dan digunakan untuk kepentingan negara

demi kesejahteraan masyarakat” (Mardiasmo, 2023). Oleh karena itu, *tax avoidance* tidak hanya dipandang sebagai isu kepatuhan, tetapi juga sebagai bagian dari strategi manajemen keuangan perusahaan.

Temuan literatur sebelumnya mengenai pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap *tax avoidance* menunjukkan hasil beragam. Penelitian yang dilakukan oleh Oktavia et al (2021), mengungkapkan bahwasannya *Good Corporate Governance* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* baik secara parsial maupun simultan, sehingga tidak terbukti mampu membatasi praktik *tax avoidance*. Sebaliknya, hasil penelitian Murtina et al (2020), *Good Corporate Governance* secara simultan berpengaruh terhadap *tax avoidance* dan secara parsial adanya variabel yang terbukti berpengaruh. Dari kedua penelitian terdahulu menunjukkan adanya hasil yang inkonsisten, sehingga diperlukan penelitian lanjutan untuk menguji kembali.

Tax avoidance dapat berubah menjadi *tax evasion* (penggelapan pajak) jika tidak terkontrol, seperti kasus 4.000 perusahaan multinasional yang menunda pembayaran pajak dalam kurun waktu 7 tahun berturut-turut pada tahun 2021, serta perusahaan Gojek dan Tokopedia (GoTo) yang menggunakan fasilitas insentif perusahaan, seperti *tax allowance* dan *tax holiday* dari UU HUP untuk melakukan *tax avoidance* pada tahun 2021-2023. Selama wabah pandemi COVID-19, praktik *tax avoidance* mencapai Rp 69,1 triliun dan berada dalam peringkat keempat di Asia, akibat penyalahgunaan insentif pajak guna mempertahankan kondisi ekonomi (Kusufiyah & Anggraini, 2023). Salah satu faktor pemicu terjadinya *tax avoidance* adalah lemahnya *Good Corporate Governance*, yang mencakup aturan pengendalian hubungan para pengelola perusahaan dan pemangku kepentingan. Meskipun *Good Corporate Governance* dapat mengontrol kinerja perusahaan, namun masih terdapat sejumlah perusahaan yang sepenuhnya belum melakukan mekanisme tersebut secara maksimal, terutama di sektor makanan dan minuman yang berkontribusi signifikan terbesar terhadap PDB.

Permasalahan *tax avoidance* tetap marak meskipun mekanisme *Good Corporate Governance* telah diberlakukan, terutama pada masa pandemi COVID-19 yang semakin memburuk. Hal ini menciptakan urgensi untuk pengujian ulang terhadap implementasi *Good Corporate Governance* yang direpresentasikan oleh kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dan kepemilikan manajerial pada periode 2020-2024.

Penelitian terdahulu mengenai pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap tax avoidance menunjukkan hasil yang belum konsisten. Sejumlah studi menyatakan bahwa GCG tidak berpengaruh terhadap tax avoidance, baik secara parsial maupun simultan, sehingga mekanisme tata kelola belum terbukti mampu menekan praktik penghindaran pajak (Hasanah et al., 2021; Oktavia et al., 2021). Sebaliknya, penelitian lain menemukan bahwa GCG berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance, baik secara simultan maupun pada variabel tertentu, yang mengindikasikan bahwa tata kelola dapat menjadi alat kontrol perilaku oportunistik manajemen (Avianita & Fitria, 2020; Murtina et al., 2020; Ratu & Hermanto, 2020). Perbedaan temuan ini membuka gap penelitian, khususnya karena variasi konteks industri, periode pengamatan, dan proksi GCG yang digunakan. Selain itu, kajian pada perusahaan manufaktur sub-sektor makanan dan minuman masih cenderung menekankan faktor keuangan tertentu dan belum menguji mekanisme GCG secara lebih terfokus pada periode yang menangkap dinamika pandemi dan pemulihan ekonomi (Komara & Gultom, 2024; Kusufiyah & Anggraini, 2023).

Berdasarkan gap tersebut, novelty penelitian ini terletak pada pengujian ulang pengaruh GCG terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur sub-sektor makanan dan minuman periode 2020–2024 dengan proksi GCG yang spesifik, yaitu kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dan kepemilikan manajerial, yang dijustifikasi melalui Agency Theory (Jensen & Meckling, 1976). Pendekatan ini diharapkan menghasilkan bukti empiris yang lebih kontekstual dan memperjelas mekanisme GCG mana yang efektif dalam mengendalikan tax avoidance.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Konsep Keagenan didefinisikan sebagai hubungan kontraktual diantara principal dengan manajemen perusahaan yang mempunyai kesamaan tujuan bersama dalam meningkatkan nilai perusahaan (Jensen & Meckling, 1976). Meskipun demikian, dalam praktiknya pihak principal dan pihak manajemen perusahaan sering terjadi kesenjangan akibat adanya *information asymmetry*, hal tersebut dikarenakan pihak manajemen sebagai pelaksana lebih banyak memahami informasi dibandingkan dengan principal. Dari pengelolaan yang dikerjakan pihak

manajemen terhadap perusahaan tidak menutup kemungkinan terjadi tindakan manipulasi data demi kepentingan pribadi.

Pajak dilihat oleh manajemen sebagai *cost* yang berpotensi menurunkan profitabilitas atau arus kas perusahaan. Oleh karena itu, manajemen melakukan *tax avoidance* untuk meningkatkan efisiensi keuangan perusahaan. Namun, dari sudut pandang pemegang saham, jika *tax avoidance* dilakukan secara agresif menimbulkan risiko denda, sanksi perpajakan, serta kerugian reputasi perusahaan di masa mendatang. Adanya *information asymmetry* memungkinkan manajemen untuk menyembunyikan atau mengungkapkan secara penuh aktivitas *tax avoidance* yang dilakukan principal, terutama ketika praktik di area abu-abu. Oleh karena itu, teori keagenan menegaskan pentingnya mekanisme pengawasan untuk meminimalkan konflik keagenan dan membatasi perilaku oportunistik manajemen, terutama terkait pajak.

Good Corporate Governance (GCG)

Good Corporate Governance (GCG) ialah aturan yang menuntun serta mengoperasikan guna mencapai keseimbangan serta kewenangan. Secara konsep GCG membangun ikatan berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama dan menghasilkan nilai tambah. Menurut (Naufal & Wahyudi, 2023), GCG memiliki lima prinsip yang digunakan sebagai pijakan dalam memilih dan menetapkan aktivitas, memberikan nilai efisien, dan nilai keefektifan perusahaan. Adapun prinsip GCG, meliputi Transparansi, Akuntabilitas, Responsibility, Independensi, dan Fairness.

GCG juga memiliki prosedur yang diterapkan untuk menjalankan fungsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas dasar prinsip, meliputi:

1) Kepemilikan Institusional

Adalah pemilik saham pada korporat oleh badan atau lembaga. Kepemilikan institusi sangat penting, karena mampu mengawasi pihak manajemen dan mengidentifikasi kesalahan yang muncul. Dengan demikian, jika pengawasan institusi meningkat maka akan lebih efisien dan dapat mengoptimalkan pengendalian kinerja manajemen (Susanti et al., 2025).

2) Dewan Komisaris Independen

ORIGINAL ARTICLE

Berkewajiban dalam tanggung jawab atas pelaksanaa pengawasan, pemberi nasihat, serta jaminan penerapan GCG yang berlangsung secara efektif, realistis, dan berfaedah. Posisi Dewan Komisaris Independen sangat penting dalam mempengaruhi persetujuan keputusan yang diambil (Muharnis, 2023).

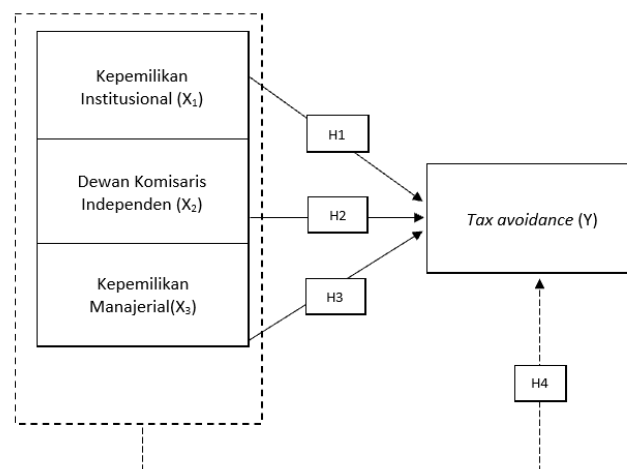
3) Kepemilikan Manajerial

Pemilik saham aktif dan ikut serta dalam mengelola perusahaan, sehingga diharapkan dapat mengharmoniskan kepentingan antara manajemen dan pemilik agar sejalan, serta mampu meminimalisir konflik keagenan. Tingkat kepemilikan manajerial harus tetap diperhatikan, karena proporsi yang berlebihan akan menimbulkan masalah dalam mengendalikan tingkat manajer.

Tax Avoidance (Penghindaran Pajak)

Menurut (Komara & Gultom, 2024), *tax avoidance* merupakan tindakan sah secara hukum untuk memperbesar pendapatan dan mengurangi kewajiban pajak bagi wajib pajak, namun hal tersebut dapat dimanfaatkan dengan cara ilegal. *Tax avoidance* sendiri terdiri dari dua macam, yaitu yang pertama merupakan penghindaran pajak ilegal yang tidak diperbolehkan oleh ketentuan undang-undang perpajakan dan dilaksanakan secara sengaja. Sedangkan yang kedua adalah penghindaran pajak legal yang dilakukan dengan porsi rendah sampai normal dengan memanfaatkan kekurangan dari peraturan perundang-undangan pajak yang diterapkan.

Kerangka Konseptual



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Hipotesis Penelitian

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *tax avoidance*

Kepemilikan institusional ialah salah satu mekanisme *Good Corporate Governance* sebagai pengawas dalam mengendalikan kebijakan manajemen, termasuk kebijakan perpajakan. Dalam penelitian Purbowati (2021), kepemilikan institusional berperan sebagai pengawas dari luar untuk mengontrol perusahaan dan mendorong manajemen dalam meningkatkan kinerja perusahaan dan menghasilkan laba tanpa melakukan *tax avoidance*. Namun, dalam praktiknya efektivitas kepemilikan institusional menekan *tax avoidance* tidak berjalan optimal dan menjadi terbatas, dikarenakan tidak berperan secara langsung, melainkan hanya mengawasi tanpa berperan aktif dalam pengambilan keputusan (Hasanah et al., 2021). Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa kepemilikan institusional diharapkan mampu menekan *tax avoidance*. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan verifikasi empiris terhadap pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap *tax avoidance* dengan data yang lebih mutakhir periode 2020-2024.

H1: Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap *tax avoidance*

Dewan komisaris independen adalah perseroan yang mempunyai tanggung jawab dalam melakukan pengawasan secara menyeluruh atau spesifik dengan memberikan arahan dan bimbingan kepada direksi terhadap kebijakan dan kinerja manajemen. Berdasarkan teori keagenan, keberadaan dewan komisaris independen diharapkan membatasi perilaku oportunistik manajemen dan semakin tinggi tingkat skala dapat meminimalkan terjadinya *tax avoidance*. Namun, temuan dari Avianita & Fitria (2020), mengidentifikasi bahwa dewan komisaris independen tidak menghasilkan implikasi yang efektif terhadap *tax avoidance*, sebab adanya dewan komisaris independen yang sekedar menjadi formalitas dalam mematuhi ketentuan BEI. Oleh karena itu, ketidakkonsistenan antara teoritis dengan hasil empiris perlu dilakukan pengamatan kembali, khususnya kondisi ekonomi pasca pandemi COVID-19 untuk memberikan bukti empiris terbaru.

H2: Dewan Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap *tax avoidance*

Teori keagenan memberikan pengertian bahwa permasalahan antara pihak manajemen dan principal dapat terjadi kapan saja. Seandainya manajemen merupakan pemegang saham, maka konflik karena kepentingan akan terjadi. Dari penelitian Ratu & Hermanto (2020), mengemukakan bahwa kepemilikan manajerial merupakan kondisi kedudukan ganda sebagai pengelola perusahaan dan pemegang saham, karena keduanya berbeda tugas menyebabkan risiko *tax avoidance* terjadi dan tidak dapat dihindarkan.

H3: Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Manajerial secara simultan terhadap *tax avoidance*.

Pengujian secara simultan terhadap indikator GCG dengan praktik *tax avoidance* hingga saat ini masih terbatas. Dalam penelitian-penelitian sebelumnya cenderung melakukan pengujian secara parsial, walaupun secara konsep ketiga indikator tersebut merupakan bagian mekanisme *Good Corporate Governance* dan saling melengkapi dalam mempengaruhi terkait perilaku perusahaan, khususnya *tax avoidance*.

H4: Terdapat pengaruh simultan antara kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance*.

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi yang diteliti dalam studi ini ialah perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang makanan dan minuman dan terdaftar di BEI selama periode 2020-2024. Teknik pengambilan sampel memanfaatkan *purposive sampling*, yakni penetapan sampel dengan mempertimbangkan tolak ukur spesifik yang telah ditetapkan. Kriteria tersebut ditentukan berdasarkan pertimbangan berikut:

- 1) Perusahaan manufaktur sub-sektor makanan serta minuman yang terdaftar di BEI sepanjang periode tahun 2020-2024.
- 2) Perusahaan yang mempublikasi laporan keuangan sepanjang periode tahun 2020-2024.
- 3) Perusahaan yang memiliki data lengkap sebagaimana kebutuhan penelitian sepanjang tahun 2020-2024.

ORIGINAL ARTICLE

- 4) Perusahaan yang mencatat laba bersih sebelum pajak selama periode 2020-2024. Dikarenakan pengukuran menggunakan proksi *Effective Tax Rate* (ETR), maka mensyaratkan nilai laba sebelum pajak yang positif, jika dengan laba negatif akan menghasilkan bias dan mengganggu hasil uji validitas.

Hasil seleksi sampel berdasarkan kriteria diperoleh, mencakup:

Tabel 1. Kriteria Sampel

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Perusahaan manufaktur sub-sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2020-2024.	40
2.	Perusahaan yang tidak mempublikasikan laporan keuangan sepanjang tahun 2020-2024.	(14)
3.	Perusahaan yang tidak memiliki data lengkap sebagaimana kebutuhan penelitian.	(10)
4.	Perusahaan yang mengalami kerugian laba bersih sebelum pajak.	(4)
Perusahaan yang digunakan sebagai sampel.		12
Total keseluruhan sampel tahun 2020-2024 (12 x 5).		60

Sumber: data sekunder, diolah 2025.

Berdasarkan seleksi tolak ukur sampel diatas diperoleh 12 perusahaan manufaktur, sehingga selama periode lima tahun melakukan penelitian sebanyak 60 data sampel. Jenis data penelitian ini menggunakan data sekunder. Metode yang dimanfaatkan dalam menghimpun data ialah teknik dokumentasi, yakni dengan menganalisis laporan tahunan (*annual report*) perusahaan tahun 2020-2024. Kemudian melakukan literatur untuk penelusuran dan pengecekan konsistensi data dengan cara manual, yaitu menginput laporan dari BEI (*annual report*) ke microsoft excel. Setelah itu, data diolah lebih lanjut menggunakan perangkat lunak statistik (SPSS 25) untuk keperluan analisis kuantitatif dan pengujian hipotesis.

Instrumen penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan tahunan (*annual report*) perusahaan periode 2020–2024. Data tersebut dimanfaatkan untuk memperoleh informasi kuantitatif yang dibutuhkan dalam pengukuran setiap variabel penelitian. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tax avoidance, yang diproksikan menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR). ETR dihitung dari perbandingan beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak, sehingga nilai ETR digunakan untuk menggambarkan tingkat beban pajak efektif yang ditanggung perusahaan.

Sementara itu, variabel independen terdiri dari tiga indikator *Good Corporate Governance*. Pertama, kepemilikan institusional diukur melalui persentase jumlah saham yang dimiliki oleh institusi dibandingkan dengan total saham yang beredar. Kedua, dewan komisaris independen diukur menggunakan proporsi jumlah komisaris independen terhadap total anggota

ORIGINAL ARTICLE

dewan komisaris, yang mencerminkan tingkat independensi fungsi pengawasan dalam perusahaan. Ketiga, kepemilikan manajerial diukur berdasarkan persentase saham yang dimiliki oleh pihak manajemen terhadap keseluruhan saham beredar, sebagai representasi keterlibatan manajemen dalam struktur kepemilikan perusahaan.

Penelitian ini menerapkan metode analisis kuantitatif berbasis data numerik dengan pendekatan perhitungan statistik menggunakan regresi linier berganda. Tahapan analisis data diawali dengan statistik deskriptif untuk memberikan gambaran umum karakteristik data pada setiap variabel penelitian melalui nilai rata-rata (mean), standar deviasi, nilai maksimum, dan nilai minimum. Selanjutnya, dilakukan uji asumsi klasik sebagai prasyarat kelayakan model regresi, yang meliputi uji normalitas untuk menilai distribusi data, uji multikolonieritas untuk memastikan tidak terjadi korelasi tinggi antarvariabel independen, uji heteroskedastisitas untuk melihat kesamaan varians error, serta uji autokorelasi untuk mendeteksi adanya korelasi residual antarperiode pengamatan.

Setelah model memenuhi asumsi yang diperlukan, analisis dilanjutkan dengan uji regresi linier berganda untuk mengevaluasi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Tahap terakhir adalah uji hipotesis guna menilai kekuatan dan signifikansi hubungan antarvariabel, yang mencakup uji koefisien determinasi (R^2) untuk mengukur kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen, uji parsial (uji t) untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen secara individual, serta uji simultan (uji F) untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Statistik Deskriptif

Tabel 2. Uji Statistik Deskriptif

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
<i>Tax avoidance</i>	51	.17	.30	.2251	.02649
Kepemilikan Institusional	51	.04	99.49	58.4671	33.19502
Kepemilikan Manajerial	51	.02	54.50	15.9651	17.33820
Dewan Komisaris Independen	51	.33	.71	.4259	.10149
Valid N (listwise)	51				

Sumber: data sekunder, diolah SPSS 2025.

Sebagaimana tabel 2 memperlihatkan, diidentifikasi valid N (listwise) sebanyak 51 perusahaan dari total 60 perusahaan yang menjadi sampel. Pengurangan tersebut dikarenakan adanya data outlier dan apabila diteruskan akan mempengaruhi hasil analisis secara signifikan. Adapun penjelasan setiap variabel adalah:

1) *Tax avoidance* (Y)

Berdasarkan tabel diatas, hasil analisis deskriptif mengindikasikan bahwa nilai paling rendah senilai 0.17 serta paling tinggi senilai 0.30. Adapun nilai rata-rata (mean) yang diperoleh senilai 0.2251, menunjukkan bahwa tingkat *tax avoidance* berada pada kategori rendah hingga sedang. Sedangkan nilai standar deviasi senilai 0.02649, mengindikasikan sampel perusahaan homogen. Sehingga dapat disimpulkan, *tax avoidance* dalam sampel perusahaan berada pada tingkat relatif stabil dan cenderung mematuhi aturan perpajakan, meskipun ada indikasi praktik efisiensi pajak.

2) Kepemilikan Institusional (X1)

Berdasarkan tabel diatas, hasil analisis menunjukkan nilai paling rendah senilai 0.04 serta paling tinggi senilai 99.49, dengan rata-rata (mean) senilai 58.4671, memperlihatkan bahwa sebagian besar saham perusahaan pada sampel didominasi oleh pihak institusional. Sedangkan standar deviasi senilai 33.19502, mengindikasikan tingkat kepemilikan institusional pada sampel perusahaan masih beragam. Maka disimpulkan, bahwa pengawasan terhadap *tax avoidance* cenderung kuat, namun untuk perusahaan dengan kepemilikan institusional rendah berpotensi tidak terlalu kuat dalam pengawasan.

3) Dewan Komisaris Independen (X2)

Hasil analisis diperoleh nilai paling rendah senilai 0.33 serta paling tinggi senilai 0.71, dengan rata-rata (mean) senilai 0.4259, mengindikasikan bahwa sampel perusahaan telah memenuhi syarat Bursa Efek Indonesia senilai 30% dari total anggota dewan. Sedangkan nilai standar deviasi senilai 0.10149, memperlihatkan bahwa komposisi dewan komisaris independen antar perusahaan dinilai cenderung stabil. Maka dapat disimpulkan, sampel perusahaan menyadari akan pentingnya keberadaan komisaris independen sebagai pengawas yang netral, walaupun cenderung tidak signifikan.

4) Kepemilikan Manajerial (X3)

ORIGINAL ARTICLE

Tabel diatas memperlihatkan nilai paling rendah senilai 0.002 serta paling tinggi senilai 54.50, dengan rata-rata (mean) senilai 15.9651, menunjukkan bahwa sebagian kecil dari sampel perusahaan memiliki saham manajerial atau kepemilikan saham diperusahaan. Sedangkan nilai standar deviasi senilai 17.33820, menunjukkan bahwa terdapat perbedaan porsi kepemilikan saham yang mengakibatkan pengaruh praktik *tax avoidance* berbeda-beda.

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilaksanakan untuk menilai apakah variabel terdistribusi normal atau tidak, dengan hasil berikut:

Tabel 3. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		51
Normal Parameters^{a,b}	Mean	.0083984
	Std. Deviation	.02642810
Most Extreme Differences	Absolute	.118
	Positive	.097
	Negative	-.118
Test Statistic		.118
Asymp. Sig. (2-tailed)		.074 ^c

Sumber: data sekunder, diolah SPSS 2025.

Berdasarkan hasil uji One-Sample Kolmogorov–Smirnov pada residual tidak terstandarisasi, diperoleh nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,074 ($> 0,05$). Hal ini menunjukkan residual berdistribusi normal, sehingga asumsi normalitas terpenuhi dan model regresi layak digunakan untuk analisis lanjutan pada penelitian ini.

2. Uji Multikolinieritas

Uji ini dijalankan dengan menganalisis taraf VIF serta nilai tolerance untuk mengevaluasi keberadaan multikolinieritas. Hasil pengujian multikolinieritas dapat diamati melalui tabel berikut:

Tabel 4. Uji Multikolinieritas

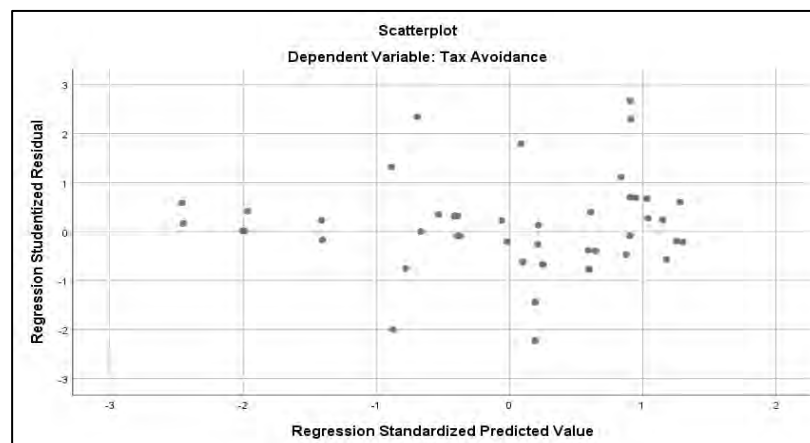
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1		
(Constant)		
Kepemilikan Institusional	.779	1.284
Kepemilikan Manajerial	.848	1.180
Dewan Komisaris Independen	.848	1.179

Sumber: data sekunder, diolah SPSS 2025.

Merujuk pada tabel 3, ditarik simpulan bahwa taraf $VIF < 10$ untuk setiap variabel serta taraf tolerance di atas 0,10. Kondisi ini menunjukkan tidak diidentifikasi gejala multikolinieritas pada tiap variable yang diujikan.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan varians residual pada model regresi. Pengujian heteroskedastisitas menggunakan metode scatterplot dengan melihat pola sebaran titik antara nilai residual (SRESID) dan nilai prediksi (ZPRED). Hasil uji scatterplot ditampilkan pada Gambar 2 berikut:



Sumber: data sekunder, diolah SPSS 2025.

Gambar 2. Uji Scatterplot Heteroskedastisitas

Berdasarkan Gambar 2, terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu, baik mengerucut, melebar, maupun bergelombang. Persebaran titik juga berada di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami heteroskedastisitas, sehingga asumsi klasik heteroskedastisitas terpenuhi dan analisis regresi dapat dilanjutkan.

ORIGINAL ARTICLE

4. Uji Autokorelasi

Pengujian ini dijalankan dengan pengujian Durbin-Watson (DW Test), dengan hasil berikut:

Tabel 5. Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.585 ^a	.392	.377	.03644	1.892

Sumber: data sekunder, diolah SPSS 2025.

Merujuk pada tabel yang telah disajikan, nilai DW tercatat sebesar 1.892 dengan batas dL (1,44) dan dU (1,72). Diperoleh hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai DW terletak diantara $dU < d < 4 - dU$, yaitu $1,72 < 1.892 < 2,28$. Kondisi ini mengartikan bahwa tidak terjadi indikasi kuat terjadinya autokorelasi. Jadi, ditarik simpulan bahwa autokorelasi tidak diidentifikasi pada model regresi, baik yang positif serta negatif.

Uji Analisis Linier Berganda

Tabel 6. Uji Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients B	t	Sig.
1 (Constant)	.198	9.399	.000
Kepemilikan Institusional	.037	2.093	.042
Kepemilikan Manajerial	.052	.534	.596
Dewan Komisaris Independen	.023	.589	.019

Sumber: data sekunder, diolah SPSS 2025.

Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda pada Tabel 6, diperoleh nilai konstanta sebesar 0,198. Nilai ini menunjukkan bahwa apabila kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dan kepemilikan manajerial berada pada kondisi konstan (tidak mengalami perubahan), maka nilai tax avoidance berada pada angka 0,198. Selanjutnya, koefisien regresi kepemilikan institusional sebesar 0,037 mengindikasikan bahwa setiap kenaikan kepemilikan institusional sebesar 1% akan diikuti peningkatan tax avoidance sebesar 0,037, dengan asumsi variabel independen lainnya tetap. Koefisien regresi dewan komisaris independen sebesar 0,023 menunjukkan bahwa peningkatan proporsi dewan komisaris independen sebesar 1% akan meningkatkan tax avoidance sebesar 0,023, dengan asumsi variabel lain konstan. Sementara itu, koefisien regresi kepemilikan manajerial sebesar 0,052 menandakan bahwa ketika kepemilikan manajerial meningkat 1% dan variabel independen lainnya tidak berubah, maka tax avoidance cenderung meningkat sebesar 0,052. Dengan

ORIGINAL ARTICLE

demikian, seluruh koefisien regresi bernilai positif, yang berarti arah hubungan ketiga variabel independen terhadap *tax avoidance* menunjukkan kecenderungan searah dalam model ini.

Uji Hipotesis

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 7. Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
	.585 ^a	.392	.377	.03644

Sumber: data sekunder, diolah SPSS 2025.

Ketika taraf R^2 meningkat, maka proporsi perubahan pada nilai variabel dependen yang dipicu variabel independennya cenderung meningkat. Sebaliknya, jika nilai R^2 menurun, maka proporsi perubahan pada variabel dependen yang dipicu oleh variabel independen juga semakin kecil. Dengan adjusted R^2 yang senilai 0.377, hasil ini menggambarkan bahwa dampak dari ketiga variabel independen adalah 37,7%. Ini berarti model regresi dapat menjelaskan sekitar 37,7% dengan tingkat yang cukup moderat dan cenderung lebih rendah terhadap *tax avoidance* (Y). Sisanya senilai 62,3% disebabkan oleh adanya variabel lainnya yang tidak terobservasi atau tidak diikutsertakan pada model ini.

Analisis Uji t (Parsial)

Uji t dilakukan guna mengidentifikasi pengaruh parsial variabel bebas terhadap *tax avoidance*, dengan hasil berikut:

Tabel 8. Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.198	.021		9.399	.000
Kepemilikan Institusional	.037	.000	.331	2.093	.042
Kepemilikan Manajerial	.052	.000	.081	.534	.596
Dewan Komisaris Independen	.023	.040	.089	.589	.019

Sumber: data sekunder, diolah SPSS 2025

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t), dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional memiliki nilai t hitung sebesar 2,093 dengan signifikansi 0,042 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional secara parsial berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Selanjutnya, dewan komisaris independen memiliki nilai t hitung sebesar 0,589

ORIGINAL ARTICLE

dengan signifikansi 0,019 ($< 0,05$), sehingga dapat dinyatakan bahwa dewan komisaris independen secara parsial juga berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sementara itu, kepemilikan manajerial menunjukkan nilai t hitung sebesar 0,534 dengan signifikansi 0,596 ($> 0,05$), yang berarti secara parsial kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Analisis Uji F (Simultan)

Uji F dimaksudkan guna mengujikan pengaruh variabel independen terhadap variabel *tax avoidance* secara simultan. Adapun hasilnya, sebagai berikut.

Tabel 9. Uji F

	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.003	3	.001	1.419	.029 ^b
	Residual	.032	47	.001		
	Total	.035	50			

Sumber: data sekunder, diolah SPSS 2025.

Dilihat melalui hasil tabel ANOVA, didapatkan nilai f_{hitung} mencapai 1.419 dengan taraf Sig. senilai 0.029 dan lebih kecil ($<$) 0.05. Maka, ditarik simpulan bahwa variabel kepemilikan institusional, dewan komisaris independent, serta kepemilikan manajerial secara bersamaan signifikan memengaruhi *tax avoidance* dan memiliki kemampuan dalam menjelaskan variasi perubahan yang terjadi.

Pembahasan Penelitian

Kepemilikan Institusional terhadap *Tax avoidance*

Merujuk pada pengujian hipotesis, didapat nilai t_{hitung} senilai 2.093 dengan koefisien regresi positif 0.037 dengan probabilitas 0.042. Analisis menunjukkan bahwa probabilitas $0.042 < 0,05$, sehingga Hipotesis pertama (H1) diterima. Dengan demikian, kepemilikan institusional signifikan memengaruhi *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kepemilikan institusional, maka semakin pula perusahaan melakukan *tax avoidance*.

Hasil temuan ini berlawanan dengan temuan oleh Hasanah et al (2021), yang mengungkapkan bahwa kepemilikan institusional tidak mempengaruhi *tax avoidance*, karena perannya hanya sebatas pengawasan, bukan keterlibatan langsung. Dengan kata lain, efektivitas kepemilikan institusional sebagai mekanisme *Good Corporate Governance* masih bergantung pada sejauh mana institusi terlibat dalam pengawasan.

Dewan Komisaris Independen terhadap *Tax avoidance*

Merujuk pada hasil pengujian, nilai t_{hitung} komisaris independen 0.593 dengan koefisien regresi senilai 0.023 dengan probabilitas 0.019. Hasil analisa menunjukkan bahwa taraf probabilitas $0.019 < 0.05$, artinya Hipotesis kedua (H2) diterima. Kemudian, ditarik simpulan bahwa dewan komisaris independen signifikan memengaruhi *tax avoidance*. Temuan ini mengindikasikan bahwa keberadaannya belum mampu menjalankan fungsi pengawasan dengan baik terhadap kebijakan *tax avoidance*, walaupun dalam ketentuan OJK sudah memenuhi senilai 30%. Hal ini mungkin disebabkan oleh keterbatasan independensi, karena perusahaan didominasi oleh pemegang saham pengendali yang membatasi ruang gerak dewan komisaris independen dalam pengawasan kebijakan. Selain itu, cenderung berfokus pada pemenuhan regulasi dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan terbatas, sehingga pengawasan terhadap *tax avoidance* kurang optimal.

Temuan hipotesis dalam penelitian ini bertentangan dengan penelitian Ridwan & Pekerti (2022), yang mengungkapkan bahwa skala *tax avoidance* tidak ditentukan oleh dewan komisaris independen, meskipun dewan komisaris independen dapat meminimalkan terjadinya *tax avoidance*.

Kepemimpinan Manajerial terhadap *Tax avoidance*

Merujuk pada hasil pengujian, nilai t_{hitung} senilai 0.053 dengan koefisien regresi senilai 0.534 dan probabilitas senilai 0.596. Analisis menunjukkan bahwa probabilitas $0.596 > 0.05$, artinya Hipotesis ketiga (H3) ditolak. Maka, ditarik simpulan bahwa kepemilikan manajerial tidak memengaruhi *tax avoidance*. Temuan ini mengindikasikan bahwa besar kecilnya kepemilikan saham manajerial pada perusahaan tidak memengaruhi kecenderungan dalam menjalankan penghindaran pajak. Di samping itu, kepemilikan manajerial belum mampu menyesuaikan kepentingan manajemen dengan pemegang saham dalam hal pengelolaan pajak. Dari perspektif teori keagenan, kepemilikan saham manajerial belum menimbulkan konflik kepentingan yang kuat antara agen dengan principal terkait kebijakan perpajakan. Dengan kata lain, kepemilikan tersebut belum mampu memengaruhi keputusan manajerial dalam pengelolaan pajak. Temuan penelitian ini bertentangan berdasarkan kajian yang dilaksanakan oleh Ratu & Hermanto (2020), karena kondisi kedudukan ganda menyebabkan terjadinya risiko yang tidak dapat dihindarkan.

Kepemimpinan Institusional, Dewan Komisaris Independen, dan Kepemilikan Manajerial terhadap *Tax avoidance*

Sebagaimana uji F (simultan) menghasilkan nilai F_{hitung} senilai 1.468 dengan Sig. senilai 0.035. Analisis menunjukka bahwa $0.035 < 0.05$, maka Hipotesis empat (H4) diterima. Kemudian, ditarik simpulan bahwa secara simultan, variabel kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, serta kepemilikan manajerial memengaruhi *tax avoidance*, sehingga seberapa besar perusahaan melakukan *tax avoidance*, ketiga variabel independen tersebut mampu menjelaskannya.

Hasil dari uji simultan menandakan berpengaruh, tidak berarti bahwa setiap variabel berpengaruh secara kuat dan signifikan. Jika diuji secara parsial masih menunjukkan adanya variabel yang tidak berpengaruh secara signifikan. Dalam konteks ini, kepemilikan institusional dan dewan komisaris independen muncul sebagai penggerak utama dalam mempengaruhi praktik *tax avoidance*, sedangkan kepemilikan manajerial tidak memberikan pengaruh signifikan secara parsial. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan perusahaan dan sistem pengawasan secara efektif mempengaruhi *tax avoidance* apabila dilakukan secara simultan, bukan hanya dari satu pihak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sub-sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2020–2024, yang ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar 0,042 ($< 0,05$). Selain itu, dewan komisaris independen juga terbukti mempengaruhi *tax avoidance* pada periode dan sektor yang sama, sebagaimana terlihat dari hasil uji parsial yang menunjukkan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Sementara itu, kepemilikan manajerial tidak menunjukkan pengaruh terhadap *tax avoidance* karena nilai signifikansinya sebesar 0,596 ($> 0,05$). Secara simultan, kombinasi variabel kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dan kepemilikan manajerial terbukti memberikan pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, yang dibuktikan melalui uji simultan dengan nilai signifikansi 0,035 ($< 0,05$).

ORIGINAL ARTICLE**Saran**

Penelitian selanjutnya dapat memperluas variabel Good Corporate Governance dengan menambahkan indikator lain seperti komite audit, ukuran dewan, kualitas audit, atau kepemilikan asing agar gambaran mekanisme pengendalian perusahaan lebih komprehensif. Penelitian berikutnya juga dapat menggunakan proksi tax avoidance alternatif (misalnya CETR atau BTD) untuk membandingkan konsistensi hasil, memperpanjang periode pengamatan, serta memperluas objek penelitian ke sektor lain agar temuan lebih kuat dan dapat digeneralisasi. Selain itu, disarankan mempertimbangkan variabel kontrol seperti profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, dan intensitas aset untuk meningkatkan ketepatan model dalam menjelaskan variasi tax avoidance.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriyanti Hasanah, Cindy Oktami, & Afdaleni. (2021). Analisis Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Tax Avoidance. *Journal Of Applied Managerial Accounting* , 5, 121–131.
- Beka Ratu, & Suwardi Bambang Hermanto. (2020). Pengaruh *Good Corporate Governance* Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9, 1–23.
- Eli Susanti, Rezky Pramurindra, Hadi Pramono, & Ira Hapsari. (2025). Peran *Good Corporate Governance* Dalam Memoderasi Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Yang Terindeks Pemeringkat Cgpi 2018-2023). *Jurnal Of Accounting And Finance Management (Jafm)*, 5, 1471–1486.
- Hani Avianita, & Astri Fitria. (2020). Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Tax Avoidance . *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9, 1–21.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs And Ownership Structure. *Journal Of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
- Muchammad Naufal, & Eko Wahyudi. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Terhadap Hostile Takeover Dalam Akuisisi Perusahaan Berkaitan Dengan Prinsip Good Corporate Governance. *Gorontalo Law Review*, 6, 220–231.
- Muhammad Rafi Muharnis. (2023). *Tanggung Jawab Pengawasan Perseroan Perorangan Dalam Mewujudkan Prinsip Akuntabilitas Pada Good Corporate Governance*.
- Prof. Dr. Mardiasmo. (2023). *Perpajakan-Edisi Terbaru: Vol.* (Fransiska Yulia A, Ed.; 1st Ed.).
- Rachyu Purbowati. (2021). Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Tax Avoidance (Penghindaran Pajak) . *Jurnal Jad* , 4, 61–76.
- Rizky Ridwan, & Retno Dyah Pekerti. (2022). Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Tax Avoidance (Survey Emiten Peserta Cgpi Yang Terdaftar Di Bei). *Jurnal Ekonomi Perjuangan (Jumper)*, 4, 1–10.
- Sri Duang Komara, & Juan Barus Gultom. (2024). Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance (Pada Perusahaan Manufaktur



ORIGINAL ARTICLE

- Subsektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bei Periode 2018-2021). *Global Accounting : Jurnal Akuntansi*, 3, 1–10.
- Vivi Oktavia, Ulfi Jefri, & Jaka Wijaya Kusuma. (2021). Pengaruh *Good Corporate Governance* Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance (Pada Perusahaan Properti Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bei Periode 2015-2018). *Jurnal Revenue*, 01(10.46306), 1–9.
- Wendy Sri Murtina, Wirmie Eka Putra, & Reni Yustien. (2020). Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Jurnal Akuntansi Dan Auditing*, 17, 47–66.
- Yunita Valentina Kusufiyah, & Dina Anggraini. (2023). Penghindaran Pajak Perusahaan Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bei Sebelum Dan Selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Dharma Andalas*, 25, 1–11.



Search

Login

[Home](#) / [Editorial Team](#)

JOURNAL ECONOMICS AND STRATEGY

Ketua Penyunting

Uswatun Hasanah, S.Pd., M.Si [SINTA ID: 6680465](#), Universitas Tjut Nyak Dhien, Indonesia

Sekretaris Penyunting

Ayu Noviani Hanum, SE., M.Si., Akt. [SINTA ID : 6197959](#), Universitas Muhammadiyah Semarang, Indonesia

Penyunting Pelaksana

Maulizar, S.E., M.Si [SINTA ID : 6143759](#) Politeknik Negeri Lhoksomawe, Indonesia

Dedi Sufriasi. S.E., M.Si [SINTA ID: 6152711](#) Universitas Serambi Mekkah

Olga Theolina Sitorus, S.E., M.Si, [GOOGLE SCHOLAR](#), Politeknik Mandiri Bina Prestasi, Indonesia

Technical Support

Dr. Awaludin, S.E., M.M., M.Si. [SINTA ID : 6761540](#) Universitas Tjut Nyak Dhien

Desain/Layout

Cindy Yolanda, S.Pd., M.Si. [SINTA ID : 6862454](#) Universitas Tjut Nyak Dhien

Alamat Redaksi:

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Tjut Nyak Dhien

Jl. Gatot Subroto/Jl. Rasmi No. 28Sei Sikambing,

Kota Medan, Sumatera Utara 20123

Telpon dan email :

e-mail : journal.jes@gmail.com

Telp. (061) 8451508 /Fax. (061) 8441163

Website: <https://journal.utnd.ac.id/index.php/jes>

- Contact Us
- Editorial Team
- Reviewers
- Peer Review process
- Publication Ethics
- Author Guidelines
- Open Access Statement
- Manuscript Template
- Plagiarsm Check
- Online Submission
- Facus and Scope
- Article Processing Charge
- Licence Term



Language

- English
- Bahasa Indonesia

Information

- For Readers
- For Authors
- For Librarians

Open Journal Systems

Editorial Office :

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS TJUT NYAK DHIEEN (UTND)

Jalan Gatot Subroto,/ Jl. Rasmi no 28 Sei Sikambing C. II, Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara 20123

E-mail : journal.jes@gmail.com / website : <https://journal.utnd.ac.id/index.php/jes>